

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Manusia menjadi manusia karena pendidikan. Hal ini dapat diartikan bahwa manusia merupakan makhluk yang bisa dididik dan makhluk yang bisa mendidik. Beberapa penemuan membuktikan bahwa manusia yang dibesarkan oleh makhluk bukan manusia cenderung memiliki perilaku mirip makhluk yang membesarkannya.

Kebutuhan manusia terhadap pendidikan bersifat seumur hidup, mulai dari buaian sampai ke liang lahat. Begitu dilahirkan, manusia bayi perlu dididik untuk bisa menyusu kepada ibunya. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap pendidikan merupakan suatu tuntutan dinamika hidup dalam upaya manusia untuk bisa mampu menyesuaikan diri secara aktif, dinamis, kreatif, dan inovatif terhadap diri dan kemajuan zaman.

Sebagai pengalaman yang mengubah kehidupan dan dalam hubungannya dengan situasi konflik, setiap sistem pendidikan dimanapun juga berpotensi memperbesar kondisi yang mengarah pada konflik kekerasan atau mengatasi dan meredakan konflik.

Konflik berawal dari perselisihan. Pada kasus Aceh, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Aceh merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat. Baik dalam hal pembagian hasil kekayaan alam maupun pada pengakuan status Aceh sebagai daerah Islam.

Konflik yang kemudian bermuara pada pecahnya perang telah memaksa kelompok masyarakat yang tidak terlibat untuk mengungsi meninggalkan tempat tinggal mereka. Keterpaksaan bisa karena memang diperintahkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik atau karena merasa takut mengalami kekerasan hingga kematian.

Konflik politik menjadi mengemuka ketika berbagai tuntutan yang disampaikan masyarakat Aceh tidak ditanggapi dengan serius oleh pemerintah pusat, baik itu sejak Indonesia merdeka sampai ditandatanganinya nota perdamaian antara GAM dan pemerintah Indonesia.

Konflik politik sebenarnya telah lama dialami rakyat Aceh, bahkan pada masa kegemilangan Kerajaan Aceh. Perebutan kekuasaan di bukan wilayah inti tidak ditanggapi secara serius oleh para penguasa Kerajaan Aceh, baik itu berupa teguran ataupun sanksi. Wilayah inti pun turut mengalami konflik perebutan kekuasaan, dengan berkembangnya isu tidak ‘menggigit’nya Aceh semenjak dipegang oleh para ratu.

Pendidikan yang terabaikan dan terisolasinya Aceh, semenjak Perang Aceh sampai terjadinya bencana tsunami di akhir tahun 2004, membuat Aceh semakin terpuruk dalam segala aspek kehidupan, khususnya secara ekonomi.

Dampak bencana biasanya berkisar pada kematian, korban luka-luka fisik, korban luka-luka non-fisik (baca: trauma); kehancuran sarana dan prasarana umum seperti pendidikan, aktivitas ekonomi dan industri, terjadi peningkatan beban fiskal dalam rangka tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi; serta kehancuran sistem sosial dan sistem kemasyarakatan lainnya atau dengan kata lain terjadinya pergeseran paradigma dan pranata sosial kemasyarakatan.

Pendidikan merupakan sektor yang paling parah terkena dampak perang dalam bentuk pembakaran, penghancuran atau pengrusakan, yakni sebanyak 527 sekolah pada periode DOM dan Darurat Militer dan 880 sekolah selama semester pertama tahun 2003.

Kehancuran juga terjadi pada 122 rumah dinas para guru, kematian 60 guru, dan penyerangan terhadap 200 guru. Banyak sekolah digunakan sebagai kamp militer baik oleh GAM maupun TNI dan Kepolisian.

Dampak bencana tsunami terhadap sektor pendidikan secara statistik adalah sebagai berikut: kehilangan lebih dari 2.500 guru, kerusakan lebih dari 2.100 sekolah, terdiri dari 1.500 SD dan hampir 300 SMP. Sekitar 150.000 siswa kehilangan akses terhadap sarana pendidikan.

Sebanyak 3.000 guru dan staf kehilangan rumah mereka. Sekitar 46.000 siswa tinggal di tenda-tenda sementara. Setidaknya SD di Aceh akan mengalami kekurangan 40.000 bakal siswa karena hilang atau tewas akibat tsunami dalam 5 tahun yang akan datang.

Keterpurukan dan ketertutupan rakyat Aceh dari segi wawasan, hubungan, dan lainnya membuat rakyat Aceh sangat mengagungkan kejayaan Kerajaan Aceh pada masa lampau dan sangat mendambakan berulangnya kembali nostalgia sebagai satu wilayah yang mandiri, baik secara finansial maupun secara kaidah.

Anak-anak dan wanita merupakan kelompok manusia yang rentan semasa dan/atau sesudah terjadinya bencana, baik itu bencana alam maupun bencana buatan manusia. Anak sebagai manusia yang belum dewasa juga memiliki hak-hak selayaknya sebagai manusia dewasa pula.

Dalam perkembangannya, anak memiliki permasalahannya tersendiri. Permasalahan anak menjadi lebih kompleks ketika anak dihadapkan pada bencana yang menimpa dirinya. Kondisi anak yang rentan pada masa bencana dan sesudahnya membuat mereka sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang lebih dari yang biasanya.

Berbagai riset dan pengalaman menunjukkan bahwa selain orangtua, keluarga, dan pengasuh lainnya, komunitas sekolah berperan penting dalam membantu anak melewati kejadian traumatis. Oleh karena itu, WHO sangat menyarankan diadakannya pemercepatan kegiatan persekolahan dan rekreasi setelah terjadi bencana (tsunami).

Anak-anak cenderung merasa aman dan terlindungi saat mereka menjalani rutinitas kehidupan yang konsisten dan bisa dibayangkan seperti menjalankan rutinitas bersekolah. Upaya pemercepatan tersebut menjadi pilihan terapi yang tepat dengan mengembalikan anak ke dunianya, bersekolah dan bermain dengan teman sebayanya.

Para pihak yang bertanggungjawab pada upaya pemenuhan hak bagi anak atas pendidikan, melakukan berbagai upaya pemercepatan tersebut dengan sepenuhnya, baik secara fisik, finansil, moral, dan dengan segenap perasaan dan pikiran.

Situasi masa-masa darurat dan rekonstruksi awal sangat dimanfaatkan momentumnya oleh para pihak tersebut untuk menstel-ulang (*reset*) dan melakukan upaya mentransformasi sistem pendidikan, yang mana lebih merupakan pendekatan pembangunan ketimbang bantuan kemanusiaan.

Komitmen tegas lembaga-lembaga tersebut adalah membangun ulang lebih baik sekaligus menciptakan standar yang lebih tinggi.

Beberapa tahun sebelum terjadinya tsunami dan di tengah memuncaknya perang antara GAM dan pemerintah pusat, UNICEF telah mengambil inisiatif melaksanakan Program Pendidikan Damai pada tahun ajaran 2001/2002. Setelah berjalan beberapa bulan, hasil evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan program menunjukkan tingkat kesuksesan yang relatif tinggi, yang ditandai dengan adanya perubahan perilaku yang nyata di diri siswa dan guru.

6.2. Saran

Tumbangnya kekuasaan selama 32 tahun pemerintahan Soeharto membawa angin perubahan yang sangat kencang dalam hal desentralisasi, otonomi, dan pemekaran berbagai wilayah.

Sektor pendidikan juga mengalami deregulasi besar-besaran dengan dihilangkannya sentralisasi sistem pendidikan nasional dan diberikannya kekuasaan kepada pemerintahan daerah untuk menerapkan otonomi di bidang pendidikan.

Desentralisasi dan otonomi yang merupakan nama lain dari politik bagi-bagi kekuasaan ternyata tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas aparat pemerintahan daerah. Akibatnya, perencanaan dan pelaksanaan berbagai proyek dan program banyak yang mengalami kedodoran, untuk bisa dikatakan jauh dari efektif dan efisien.

Pemerintah daerah masih sangat memerlukan bimbingan, pelatihan, perbaikan dan lainnya dalam penentuan skala prioritas dalam perencanaan dan pelaksanaan serta mekanisme pengawasan berikut penegakkan hukum dan pemberian sanksi, dan lainnya. Hal ini berlaku hampir di seluruh sektor, termasuk sektor pendidikan.

Khusus pada aspek perbaikan dan penjaminan mutu pada sistem pendidikan, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pemerintah daerah dinilai masih minim. Unsur-unsur pada sistem pendidikan mencakup

guru, siswa, kurikulum, bahan ajar, manajemen sekolah, proses belajar-mengajar, lingkungan fisik dan sosial sekolah.

Minimnya partisipasi pemerintah daerah lebih bisa dipahami akibat minimnya kapasitas pemerintah daerah dalam menangani hal-hal yang menjadi hak dan kewajibannya secara bersamaan. *Mind setting* mereka terbiasa pada doktrin jihad dan mati syahid, bukannya pada doktrin jihad dan hidup damai dan sejahtera serta segala hal positif lainnya.

Keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah membuat para pihak, lembaga-lembaga non-pemerintah, yang merasa bertanggungjawab terhadap pendidikan dan kehidupan anak Aceh tidak bisa tinggal diam dan menunggu. Akibatnya, banyak terlihat adanya tumpang tindih, ketidaksinkronan, tidak-terkoordinasinya berbagai program dan proyek rehabilitasi, rekonstruksi, serta pembangunan fisik dan non-fisik.

Beberapa lembaga non-pemerintah tersebut antara lain Bank Dunia, UNDP, UNORC, UNICEF, USAID, Norwegian Refugee Council, GTZ, CARE International, OXFAM, JICA, AIPRD, CARDI, the International Save the Children Alliance, the International Rescue Committee, Women's Commission for Refugee Women and Children, Jesuit Refugee Service, World Vision, Sampoerna Foundation, LBH Banda Aceh– Pos Meulaboh, dan lainnya.

Lebih daripada itu, belum terlihat adanya upaya menciptakan sistem pendidikan Aceh yang khas bernuansa Islami dan bermuatan lokal seperti kesenian dan budaya serta sistem sosial kemasyarakatan yang pernah berlaku.

Secara administratif, pemerintah provinsi perlu memiliki wewenang untuk meminta pemerintah daerah menyediakan data dan informasi secara rutin dan bermutu agar bisa dibuatkan perencanaan pendidikan yang baik, pembuatan anggaran, dan pengambilan keputusan.

Memahami berbagai kekurangan dan kelemahan yang wujud dan nyata pada sistem desentralisasi dan otonomi daerah dan pada sektor pendidikan, pemerintah pusat hendaknya tidak berpangku-tangan saja. Intervensi dari pemerintah pusat tetap diperlukan sepanjang sesuai ketentuan dan aturan hukum yang berlaku.